

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan antar kelompok terutama di kalangan remaja kini menjadi persoalan serius di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pola kekerasan antar kelompok yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang diakses secara *real time* melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat 35.025 kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Hingga saat ini, kelompok usia remaja (13-17 tahun) mendominasi jumlah korban kekerasan dengan persentase 35,2%. Angka ini menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan pada kalangan remaja di Indonesia.

Kekerasan antar kelompok adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyerang kelompok lain yang disebabkan oleh konflik kepentingan dan menimbulkan kerugian fisik, psikologis, serta material. Menurut WHO (2002), kekerasan kelompok (*collective violence*) ialah penggunaan kekerasan fisik atau kekuasaan yang disengaja oleh suatu kelompok (organisasi, komunitas, atau negara) terhadap kelompok lain, yang bertujuan untuk memenangkan kekuasaan dan menimbulkan cedera, kerusakan psikologis, hingga kematian. Kekerasan antar kelompok termasuk penyimpangan sosial yang menentang norma-norma sosial, moral, serta hukum (Hisyam, et al., 2025). Karena, secara normatif segala bentuk larangan terhadap penyimpangan sosial terutama tindak kekerasan antar kelompok

telah diatur dalam norma-norma sosial dan aturan hukum. Namun, pada beberapa kajian empiris ditemukan bahwa norma sosial dan aturan hukum masih belum cukup efektif dalam pengimplementasiannya.

Tindak kekerasan antar kelompok bukan hanya disebabkan oleh minimnya kepekaan individu terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku, tetapi karena adanya dominasi rasa solidaritas dan tekanan kepentingan kelompok yang berujung pada pembenaran atas tindak kekerasan (Mahdiansyah, 2017). Hal tersebut diperkuat oleh kajian Ichwanul (2022) yang juga menyebutkan bahwa dalam kasus kekerasan antar kelompok dapat terjadi pada struktur sosial yang menekankan solidaritas kelompok dan senioritas, sehingga kekerasan menjadi hal wajar yang selalu ditoleransi.

Hal ini menunjukkan dan memperkuat fakta bahwa norma sosial dan aturan hukum belum cukup efektif dalam menekan tindak kekerasan antar kelompok jika tidak disertai kontrol sosial. Kontrol sosial menekankan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi semata-mata bukan karena pelakunya tidak mengerti norma sosial dan aturan hukum, melainkan karena lemahnya ikatan antara individu dengan institusi formal dan sosial yang berperan membentuk sikap patuh masyarakat (Hirschi, 1969). Apabila diantara institusi formal dan sosial yang berperan gagal menjalankan fungsinya, maka norma tidak lagi berjalan dengan efektif secara normatif.

Institusi formal merupakan serangkaian aturan, regulasi, dan struktur organisasi yang di bentuk secara resmi oleh negara untuk mengatur interaksi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat (North, 1991). Berbeda dengan norma yang

berkembang dalam masyarakat yang tumbuh secara alami, institusi formal memiliki sifat mengikat, tertulis, dan memiliki sanksi serta mekanisme yang telah ditentukan. Terdapat dua mekanisme yang digunakan institusi formal dalam menjalankan fungsinya, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme represif. Mekanisme preventif merupakan pencegahan yang dilakukan dengan melakukan pembinaan, sosialisasi nilai dan aturan hukum, serta membangun lingkungan kondusif untuk kepatuhan sosial. Sedangkan mekanisme represif adalah tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi, berupa pemberian sanksi. Melalui kedua mekanisme tersebut, institusi formal akan menjalankan tugasnya, yaitu menciptakan keteraturan, mengurangi konflik dan ketidakpastian dalam masyarakat, serta membentuk masyarakat yang patuh terhadap norma dan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, institusi sosial merupakan norma, nilai, dan pola perilaku yang tumbuh secara alami dan terbentuk melalui dinamika interaksi sosial dalam masyarakat. Institusi sosial tidak memerlukan peresmian atau legitimasi langsung dari negara, tetapi tetap memegang kendali penuh dalam pembentukan karakter dan perilaku individu (North, 1991). Institusi sosial memiliki mekanisme kerja dengan menggunakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai moral, etika, serta norma sosial secara bertahap sejak dini hingga dewasa, mengikuti alur kehidupan individu. Sehingga menjadi pedoman individu untuk menentukan jalan hidupnya, melalui keputusan yang diambil. Tugas utama institusi sosial adalah membangun kesadaran internal terhadap nilai dan norma yang berlaku, sehingga membentuk kepatuhan dalam diri individu.

Fenomena melemahnya kontrol sosial oleh institusi formal dan sosial terhadap norma sosial dan hukum saat ini sering terjadi pada daerah perkotaan. Dinamika sosial wilayah perkotaan yang kompleks menciptakan peluang bagi para pelaku kekerasan (Maimon dan Browning, 2010). Salah satu diantaranya ialah Kota Semarang. Hal ini dikarenakan Kota Semarang memiliki kepadatan penduduk dengan heterogenitas yang tinggi. Sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, industri, dan pendidikan di Jawa Tengah, Kota Semarang tidak hanya mengalami dinamika perkembangan sosial yang pesat, tetapi juga harus menghadapi berbagai macam persoalan sosial. Kekerasan antar kelompok merupakan salah satu contoh persoalan sosial yang terjadi di Kota Semarang.

Bentuk persoalan sosial dalam konteks kekerasan antar kelompok yang sering terjadi di Kota Semarang ialah tawuran. Tawuran merupakan konflik yang berujung perkelahian antara dua kelompok, biasanya terjadi antar dua kelompok pelajar, kelompok wilayah, atau gangster. Berikut adalah penyajian data dalam tabel yang berisi rangkuman aksi-aksi tawuran yang terjadi di Kota Semarang sepanjang tahun 2025. Data tersebut bersumber dari pemberitaan di media yang terpublikasi dan dapat diakses oleh publik. Dalam pencarian data aksi tawuran terdapat keterbatasan akses yang menyebabkan tidak semua aksi tawuran dapat disajikan dalam tabel tersebut. Beberapa aksi tawuran hanya diberitakan melalui media sosial dan tidak dipublikasikan oleh media massa, sehingga data dalam tabel ini bersifat indikatif.

Tabel 1.1 Data Aksi Tawuran 2025 di Kota Semarang

Waktu Kejadian	Lokasi	Bentuk Kejadian	Keterangan	Sumber
16 Januari 2025	Bandarharjo	Antargeng	Pembubaran tawuran dan	Detik Jateng (2025)

			pengamanan dua remaja pembawa senjata tajam oleh polisi.	
15-16 Januari 2025	Semarang Tengah	Upaya tawuran	Tawuran remaja digagalkan oleh patroli kepolisian.	Humas Polrestabes Semarang (2025)
16 Februari 2025	Semarang Barat	Antargeng	Tawuran di depan Pasar BK oleh remaja mabuk dan bersenjata, dua belas remaja diamankan.	Detik Jateng (2025)
6 Maret 2025	Tambakrejo	Upaya tawuran	Sebelas remaja diamankan polisi sebelum tawuran terjadi.	Detik Jateng (2025)
16-17 Mei 2025	Sawah Besar	Antargeng	Bentrokan di depan Pasar Waru, melibatkan senjata tajam dan petasan.	Ayo Semarang (2025)
18 Mei 2025	Panggung Lor	Tawuran Remaja Putri	Tawuran menggunakan senjata tajam antar dua kelompok putri.	Detik Jateng (2025)
25 Mei 2025	Sawah Besar	Dugaan tawuran	Pengamanan dua remaja oleh polisi, karena membawa senjata tajam.	Suara Merdeka (2025)
25 Mei 2025	Bandarharjo	Tawuran maut	Tawuran menyebabkan korban meninggal dunia.	Jateng Pos (2025)
15 Juni 2025	Genuk	Tawuran gangster	Penangkapan satu pelaku gangster menyebabkan satu orang meninggal.	Detik Jateng (2025)
28 Juni 2025	Candisari	Tawuran bersenjata tajam	Tawuran bersenjata tajam dan aksi kejar-kejaran.	Radar Semarang (2025)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Tawuran di Kota Semarang kerap kali terjadi dan cenderung berpusat di wilayah kumuh, rawan konflik, dan padat penduduk. Salah satu wilayah di Kota Semarang

yang hingga kini masih kerap terjadi tawuran dan dilabeli sebagai wilayah rawan tawuran ialah Kelurahan Sawah Besar. Kelurahan Sawah Besar sempat mendapat julukan sebagai “kandang kerbau”, hal ini dikarenakan wilayahnya yang terkenal kumuh dengan padatnya pemukiman penduduk. Menurut Shawn dan McKay (1942), wilayah yang padat penduduk dengan disorganisasi sosial yang tinggi memiliki resiko tinggi akan terjadinya perilaku menyimpang yang memicu aksi tawuran. Hal tersebut sama halnya dengan kondisi wilayah di Kelurahan Sawah Besar. Kondisi lingkungan yang tidak stabil memperkuat resiko terlibatnya remaja dalam tawuran, dikarenakan rendahnya kontrol sosial komunitas serta adanya tekanan dari lingkungan yang kurang mendukung perkembangan moral sosial seseorang (Nasution, et al., 2025). Kontrol sosial merujuk pada mekanisme dan proses yang digunakan oleh institusi formal dan sosial untuk mengarahkan, membujuk, dan mengajak masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, kontrol sosial berperan sebagai fungsi yang harus dijalankan institusi formal dan sosial untuk membatasi dan mencegah masyarakat melakukan penyimpangan sosial.

Faktor lingkungan atau kondisi geografis yang dialami oleh Kelurahan Sawah Besar tidak menjadi satu-satunya faktor yang memicu terjadinya tawuran di Kelurahan Sawah Besar. Berbagai macam faktor internal dan eksternal juga menjadi pemicu terjadinya tawuran. Faktor internal pemicu tawuran meliputi kebutuhan validasi, pencarian identitas dan pengakuan oleh kelompok, tekanan solidaritas kelompok, hingga harga diri atau *pride* yang tinggi. Sarwono (2005)

menyebutkan bahwa pada fase ini remaja melakukan pencarian jati diri. Salah satu caranya ialah melalui pengakuan atau validasi yang didapatkan dari kelompok.

Selain itu, keluarga juga berpengaruh secara signifikan atas keterlibatan seseorang akhirnya memutuskan terlibat dalam tawuran. Keterlibatan seseorang dalam aksi tawuran cenderung lebih tinggi disaat mereka mengalami disfungsi keluarga karena kurang mendapat dukungan orang tua, perhatian, dan pola asuh yang kurang tepat. Secara tidak langsung kondisi tersebut membentuk kepribadian anak yang selalu mencari jati diri melalui kelompok sebaya yang mungkin saja memiliki pengaruh negatif dengan norma kekerasan (Susmiyati dan Ikawati, 2018).

Faktor institusional lainnya yang ikut andil dalam dinamika tawuran adalah sekolah. Perilaku menyimpang seseorang dapat dipelajari melalui interaksinya bersama teman sebaya. Terutama di lingkungan sekolah yang lebih minim pengawasan orang tua dengan lingkungan yang tidak efektif dalam mengontrol diri sebagai pelajar (Hamdani et al., 2024). Berbagai faktor internal dan eksternal tersebut akhirnya menimbulkan dampak sosial yang cukup serius. Tawuran berdampak pada kerusakan infrastruktur umum, terhambatnya aktivitas warga, hingga menimbulkan korban jiwa. Lebih daripada itu, tawuran juga menimbulkan dampak trauma psikologis bagi pelaku, rusaknya hubungan, hingga terganggunya kualitas keamanan lingkungan (Fadhlullohman et al., 2025). Sama halnya dengan pelaku, masyarakat sekitar lingkungan terjadinya tawuran juga mengalami trauma psikologis, seperti munculnya rasa takut, rasa tidak nyaman, dan was-was akan terulangnya aksi tawuran di sekitar mereka.

Meskipun di beberapa penelitian telah mengidentifikasi bahwa faktor penyebab terjadinya tawuran adalah faktor internal dan eksternal, seperti faktor egoisme, pergaulan, lingkungan, ekonomi, dan budaya, faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa aksi tawuran masih kerap terjadi hingga saat ini. Selaras dengan fakta empiris yang menunjukkan data yang diunggah melalui portal berita lokal dan website resmi kepolisian Kota Semarang tahun 2025, aksi tawuran masih berlanjut hingga saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksi tawuran di Kelurahan Sawah Besar tidak dapat dicap hanya sebagai akibat dari faktor internal dan eksternal sebagai pemicu, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan peran institusi formal dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah tawuran. Institusi formal dan sosial tidak hanya menjalankan struktur secara normatif, tetapi juga memiliki fungsi dalam membina, mengawasi, serta menginternalisasi nilai norma yang membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Ketika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, maka akan terjadi disfungsi peran yang berimbas pada melemahnya kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang, khususnya tawuran.

Upaya pencegahan tawuran di wilayah perkotaan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab institusi formal dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dalam penelitian ini terdapat tiga institusi formal yang dianalisis perannya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah fenomena tawuran, yaitu institusi pendidikan, instansi pemerintahan lokal yang diwakili oleh Kelurahan Sawah Besar, dan aparat keamanan yang diwakili oleh Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari. Ketiga institusi tersebut termasuk dalam institusi formal yang ada di

Kelurahan Sawah Besar karena ketiganya terbentuk secara resmi oleh negara, dilegitimasi, memiliki stuktur organisasi, dan terdapat peraturan yang mengatur dan akan menentukan tugasnya.

Pertama, institusi pendidikan sebagai elemen kunci dalam pencegahan fenomena tawuran. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga berperan sebagai pemegang kontrol sosial dalam pembentukan karakter, nilai, dan ikatan sosial remaja di lingkungan sekolah. Tanggung jawab institusi pendidikan dalam pencegahan tawuran tidak hanya sebatas pembinaan untuk siswa, tetapi juga ada koordinasi sinergitas antara institusi pendidikan, keluarga siswa, dan masyarakat meliputi kondisi sosial di lingkungan sekitar sekolah. Dalam penelitian ini, institusi pendidikan yang berada di wilayah Kelurahan Sawah Besar dipilih sebagai salah satu subjek penelitian karena letak geografisnya dan perannya yang langsung terhubung dengan remaja. Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan akses dalam pengumpulan data untuk seluruh institusi pendidikan yang ada di wilayah Kelurahan Sawah Besar. Maka dari itu, pengumpulan data dilakukan di SMP Negeri 4 Semarang sebagai satu-satunya sekolah negeri yang ada di Kelurahan Sawah Besar, dengan beberapa data yang cukup relevan.

Perlu ditegaskan bahwa pelaku tawuran yang akan menjadi informan dalam penelitian ini bukan berasal dari SMP Negeri 4 Semarang. Pemilihan informan pelaku tawuran dilakukan secara terpisah dari pemilihan SMP Negeri 4 Semarang sebagai subjek penelitian dari unsur institusi pendidikan. Ketiga pelaku tawuran dipilih karena mewakili salah satu kelompok tawuran yang aktif maupun pernah

aktif di wilayah Kelurahan Sawah Besar, sehingga pengalaman dan latar belakang mereka dapat mendeskripsikan dengan lebih representatif mengenai dinamika tawuran yang terjadi di kelurahan tersebut. Dengan demikian, SMP Negeri 4 Semarang dan pelaku tawuran merupakan dua unsur informan yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan secara langsung, di mana SMP Negeri 4 Semarang nantinya akan mewakili sudut pandang institusi pendidikan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, sedangkan pelaku tawuran mewakili sudut pandang kelompok yang menjadi sasaran dari fungsi kontrol sosial tersebut.

Kedua, Kelurahan Sawah Besar sebagai institusi formal yang menjalankan sistem pemerintah di tingkat lokal dan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran dalam memberikan pelayanan publik, menjalankan fungsi koordnatif dan administratif, serta menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Pemilihan Kelurahan Sawah Besar sebagai salah satu institusi formal juga didasari oleh fakta bahwa lokus penelitian ini terdapat pada wilayah Kelurahan Sawah Besar yang menjadi tempat utama terjadinya fenomena tawuran, sehingga kelurahan memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan hingga penanggulangan tawuran di wilayahnya. Kelurahan Sawah Besar berperan dalam melaksanakan koordinasi dan menjadi penghubung antara aparat kepolisian, sosial, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan aksi tawuran. Selain itu, Kelurahan Sawah Besar juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi antar masyarakat, penguatan kegiatan kepemudaan, dan memberikan pembinaan sosial pada masyarakat. Oleh karena itu, Kelurahan Sawah Besar tidak hanya memegang peran pada pelayanan

administratif, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam aksi penanggulangan tawuran.

Ketiga, Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari sebagai aparat penegak hukum yang secara khusus memiliki tugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal desa atau kelurahan, termasuk Kelurahan Sawah Besar sebagai salah satu wilayah dibawah tanggung jawab Polsek Gayamsari. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi preventif melalui pencegahan, deteksi dini, pembinaan, sambang *door to door*, kunjungan, dan patroli. Serta represif melalui pengamanan TKP, memberhentikan aksi tawuran yang sedang terjadi, tindakan penegakan hukum yang sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021.

Di sisi lain, dalam upaya pencegahan fenomena tawuran, institusi sosial sering kali lebih efektif karena dinamika yang bersentuhan langsung secara emosional dan spiritual dengan individu yang tidak dapat dijangkau oleh sistem aturan hukum. Dalam penelitian ini, institusi sosial yang dilibatkan terdapat dua institusi, yaitu keluarga dari pelaku tawuran dan tokoh agama setempat. Keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk pribadi dan mengendalikan perilaku. Keluarga menjadi institusi pertama dan yang paling dekat bagi remaja dalam membentuk orientasi hidup, kepribadian, nilai, dan norma. Pemilihan keluarga pelaku tawuran sebagai institusi sosial dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa dinamika antar anak dengan keluarga akan menggambarkan kondisi paling akurat mengenai disfungsi sosial yang menyebabkan anak terlibat dalam tawuran. Kajian empiris sebelumnya juga memperkuat bahwa ketika keluarga tidak berperan secara utuh dalam tumbuh

kembang anak, sehingga fungsi pengasuhan, pengawasan, dan komunikasi keluarga tidak berjalan baik, dan adanya tekanan ekonomi, akibatnya anak akan mencari pengakuan dan membentuk jati diri bersama teman sebaya (Anarta, et al., 2021). Lemahnya peran keluarga dapat mendorong anak untuk menggantikan posisi keluarga dengan teman sebaya yang menurutnya memberikan validasi yang anak butuhkan.

Fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak juga dinilai dari pemahaman anak terhadap ajaran agama. Tokoh agama dipilih sebagai salah satu institusi sosial dalam penelitian ini berperan menjalankan fungsi kontrol sosial untuk membantu memberikan arahan seberapa penting mematuhi dan mengamalkan ajaran agama. Tokoh agama juga harus membangun hubungan spiritual yang baik dengan masyarakat, serta menyampaikan pesan untuk meninggalkan perbuatan menyimpang dan jauh dari ajaran agama. Ajaran-ajaran agama yang disampaikan melalui tokoh agama ini membantu individu untuk membangun kepribadian yang taat ajaran baik dan jauh dari perbuatan menyimpang, serta mampu menjangkau ikatan batin yang tidak bisa dijangkau oleh institusi formal. Selain itu, hal ini juga didasari oleh kondisi Indonesia yang menunjukkan karakteristik sebagai negara religius dan memiliki kultur religi dalam pembangunan karakter masyarakat.

Konflik tawuran akhirnya menjadi semakin kompleks ketika koordinasi antar peran institusi formal dan sosial tidak berjalan dengan baik. Penanganan konflik yang dilakukan seadanya dengan tidak melakukan kolaborasi dengan baik akhirnya hanya menjadi pencegahan bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar

permasalahan. Lemahnya koordinasi antar institusi merupakan bentuk dari disfungsi peran. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya kontrol sosial. Akibatnya, semakin terbuka ruang bagi para pelaku tawuran untuk kembali melakukan aksinya. Kembali terulangnya aksi tawuran ini menunjukkan jika berbagai upaya yang dilakukan belum berjalan secara terintegrasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bermula dari asumsi bahwa aksi tawuran di Kelurahan Sawah Besar yang masih kerap terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor internal dan eksternal pelaku, tetapi juga karena adanya disfungsi peran institusi formal dan sosial dalam proses penanggulangan tawuran.

Sebelumnya, penelitian sejenis sudah pernah diteliti, yaitu pada jurnal Peran Kepolisian dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga sebagai Upaya Mewujudkan Perilaku Warga Negara yang Baik (Alberthus, Metekohy, dan Bakker, 2022), jurnal Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar (Ilmi dan Fauziah, 2024), dan jurnal ketiga dengan judul Peran Struktur dan Institusi Keluarga terhadap Kasus Tawuran antar Remaja di Kota Bekasi (Wati, 2025). Tetapi dalam penelitian kali ini, saya menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan berfokus pada penelitian secara komprehensif bagaimana peran institusi formal dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dinamika peran institusi formal dan sosial yang menjadi salah satu faktor terjadinya tawuran di Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana institusi formal dan sosial dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dalam mencegah tawuran di Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran institusi formal dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Agar dapat berkontribusi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas mengenai peran institusi formal dan sosial dalam mencegah tawuran melalui fungsi kontrol sosial secara teoritis. Lebih daripada itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji peran institusi formal dan sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi institusi formal yang terlibat agar dapat melakukan evaluasi atas peran mereka dalam mencegah fenomena tawuran, serta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan bagi institusi sosial yang terlibat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan akan menjadi pedoman serta literatur yang akan membantu peneliti dalam melengkapi dan menyelesaikan penelitiannya. Maka dari itu, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam memahami pembaruan penelitian dan pendekatan yang digunakan. Berikut merupakan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam mencari *gap* antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian pertama dilakukan oleh Alberthus, Metekohy, dan Bakker (2022) dengan judul *Peran Kepolisian dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga sebagai Upaya Mewujudkan Perilaku Warga Negara yang Baik*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Subjek penelitian ini meliputi warga yang terlibat konflik dari dua RT, Ketua RW, dan aparat kepolisian setempat.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tawuran yang terjadi di Kelurahan Benteng terjadinya karena pelaku dalam pengaruh alkohol, adanya dendam lama, hingga dorongan pencarian jati diri melalui perilaku agresif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana peran Kepolisian dalam mengatasi konflik tawuran di Kelurahan Benteng dan mengidentifikasi faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penyelesaian konflik.

Persamaan antara penelitian oleh Alberthus, Metekohy, dan Bakker (2022) dengan judul *Peran Kepolisian dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga sebagai Upaya Mewujudkan Perilaku Warga Negara yang Baik* dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis bagaimana peran institusi formal secara khusus dalam kasus ini adalah Kepolisian dalam upaya menanggulangi aksi tawuran. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Benteng Kota Ambon, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Sawah Besar Kota Semarang. Selain itu, peneliti tidak hanya berfokus pada peran Kepolisian, tetapi juga pada institusi formal dan sosial lainnya.

Pada penelitian kedua, oleh Ilmi dan Fauziah (2024) dengan judul *Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Subjek penelitian ini meliputi guru bimbingan dan konseling, fasilitator bimbingan kelompok, serta siswa SMA Al-Azhar Medan yang terlibat atau berisiko terlibat tawuran. Melalui penelitian ini diharapkan dapat

diketahui efektivitas layanan bimbingan kelompok sebagai strategi pencegahan tawuran pelajar serta implikasinya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi proses pembelajaran.

Persamaan antara penelitian Ilmi dan Fauziah (2024) dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sama-sama menganalisis peran sekolah dalam menanggulangi tawuran. Sedangkan perbedaan antar kedua penelitian ini adalah pada lokasi penelitiannya, jika penelitian oleh Ilmi dan Fauziah (2024) dilakukan di SMA Al-Azhar Medan, maka peneliti akan melakukan penelitian di SMP Negeri 4 Semarang.

Pada penelitian ketiga, oleh Intan Waras Wati (2025) dengan judul *Peran Struktur dan Institusi Keluarga terhadap Kasus Tawuran antar Remaja di Kota Bekasi*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Subjek penelitian ini meliputi remaja yang pernah terlibat tawuran, orang tua atau keluarga remaja, guru, serta tokoh masyarakat di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus tawuran antar remaja dipengaruhi oleh lemahnya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak, kurangnya penanaman nilai sosial dan agama, rendahnya kualitas komunikasi dalam keluarga, serta minimnya pengawasan orang tua. Penelitian ini menegaskan bahwa struktur dan institusi keluarga memiliki peran penting dalam mencegah tawuran antar remaja melalui pendidikan nilai moral, menjaga keharmonisan keluarga, memberikan pengawasan, mengajarkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, serta berkolaborasi dengan komunitas sosial.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Intan Waras Wati (2025) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama peran institusi sosial, khususnya keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua penelitian tersebut juga menempatkan tawuran sebagai masalah sosial yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya. Adapun perbedaannya terletak pada fokus institusi dan lokasi penelitian. Penelitian Intan Waras Wati (2025) lebih menitikberatkan pada peran struktur dan institusi keluarga dalam menanggulangi tawuran antar remaja di Kota Bekasi, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada peran institusi formal dan institusi sosial secara lebih luas, seperti sekolah, kepolisian, pemerintah kelurahan, serta tokoh masyarakat dalam menanggulangi kasus tawuran di Kelurahan Sawah Besar Kota Semarang. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan peneliti berupaya melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis peran institusi secara lebih komprehensif.

Pada penelitian keempat, oleh Hisyam, et al. (2025) dengan judul *Analisis Fenomena Tawuran Remaja dalam Perspektif Perilaku Menyimpang: Studi Kasus di Daerah Manggarai, Jakarta Selatan*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengamatan terhadap tokoh masyarakat di tiga wilayah RW. Penelitian ini menganalisis fenomena tawuran remaja menggunakan perspektif teori anomie Robert K. Merton, dengan menekankan bagaimana ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan keterbatasan akses pendidikan serta pekerjaan mendorong remaja melakukan tindakan menyimpang berupa tawuran. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan tawuran di wilayah tersebut dilakukan melalui pendekatan keagamaan, pelatihan keterampilan, penyediaan lapangan kerja, serta penguatan koordinasi antarwilayah oleh tokoh masyarakat setempat.

Persamaan antara penelitian Hisyam, et al. (2025) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji fenomena tawuran remaja sebagai bentuk perilaku menyimpang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menyoroti peran tokoh masyarakat dan institusi sosial dalam upaya pencegahannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada kerangka teori dan ruang lingkup institusi yang dianalisis. Penelitian Hisyam, et al. (2025) menggunakan teori anomie Robert K. Merton dengan subjek penelitian yang terbatas pada tokoh RW di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi dengan melibatkan institusi formal dan sosial secara lebih luas, yaitu sekolah, kepolisian, pemerintah kelurahan, keluarga, dan tokoh agama di Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan peneliti berupaya memperkaya kajian mengenai fenomena tawuran dengan menempatkan ikatan sosial sebagai unsur penentu efektivitas peran institusi formal dan sosial.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Kontrol Sosial

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori kontrol sosial milik Travis Hirschi. Teori kontrol sosial pertama kali muncul dalam karyanya yang berjudul *Causes of Delinquency* (1969). Awal mula terciptanya teori ini adalah

sebagai bentuk kritik Hirschi terhadap teori ketegangan yang berasumsi bahwa pada dasarnya manusia hanya akan melanggar aturan dan melakukan penyimpangan jika ditekan oleh permasalahan ekonomi. Hirschi juga mengkritik asumsi dari teori penyimpangan budaya yang mengatakan bahwa remaja yang melakukan penyimpangan adalah mereka yang tunduk pada nilai-nilai geng atau kelompok yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Menurut Hirschi (1969), teori-teori tersebut terlalu fokus dengan menggali mengapa seseorang menjadi tidak patuh pada peraturan.

Hirschi akhirnya melakukan reorientasi fundamental dengan menggunakan pemikiran Hobbesian, bahwa manusia secara alami melakukan penyimpangan untuk mencapai kepentingan pribadi jika tidak ada kontrol sosial yang menghalanginya, dan berakhir kehidupannya akan dipenuhi dengan konflik. Maka dari itu, teori kontrol sosial milik Hirschi menekankan pada pertanyaan mengapa sebagian besar dari kita tetap mematuhi norma serta aturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan menyimpang, bukan berfokus pada mengapa seseorang melanggar aturan.

Menurut Hirschi (1969), kontrol sosial adalah mekanisme yang bekerja melalui ikatan-ikatan yang mengikat ikatan sosial antara individu dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Kontrol sosial tidak semata-mata tentang bagaimana masyarakat melakukan paksaan terhadap individu, memberikan sanksi atau hukuman. Kontrol sosial bekerja melalui mekanisme psikologis yang menuntun individu untuk merasa terintegrasi dan terikat oleh norma dan masyarakat melalui interaksinya dengan institusi formal dan sosial,

sehingga individu merasa tidak bebas untuk melakukan penyimpangan. Hirschi (1969) menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk melakukan penyimpangan, namun hal tersebut dapat diredam dengan ikatan sosial yang kuat antara lingkungan, individu, serta institusi formal dan sosial. Melalui kontrol sosial, keamanan, ketertiban, dan keteraturan dalam masyarakat mampu untuk mengahpus penyimpangan, karena individu merasa memiliki jiwa kepatuhan dan keterikatan.

Apabila kontrol sosial melemah, akan terjadi situasi dimana individu merasa bebas dalam melakukan penyimpangan. Hirschi menekankan jika ikatan sosial individu dengan masyarakat lemah, maka penyimpangan, seperti tawuran berpotensi tinggi akan terjadi. Hal tersebut dapat terjadi jika ikatan individu dengan keluarga, tokoh agama, sekolah, aparat penegak hukum, dan lingkungan sosial melemah, maka norma dan aturan hukum tidak lagi berjalan sesuai dengan semestinya. Faktor yang mendasari lemahnya kontrol sosial terhadap ikatan sosial bukan hanya faktor ekonomi atau budaya, tetapi adanya kegagalan institusi formal dan sosial di sekitar individu dalam menjaga ikatan sosial tersebut. Bagi Hirschi, penyimpangan adalah tindak pelanggaran nilai, norma, dan aturan hukum yang terjadi sebab ketiadaan hambatan sosial, hal ini jelas dapat terjadi pada siapapun dari kelas sosial manapun selama kontrol sosial pada individu tersebut melemah.

Teori kontrol sosial menempatkan institusi formal dan sosial sebagai aktor penting dalam membentuk individu yang patuh terhadap nilai, norma, dan aturan hukum. Teori kontrol sosial menjadi dasar yang menekankan peran keluarga, tokoh agama, sekolah, aparat penegak hukum, komunitas, dan institusi formal dalam

membangun kepatuhan sosial. Untuk dapat memperkuat ikatan sosial yang membangun kontrol sosial antar institusi formal dan sosial, Hirschi memberikan empat unsur pendukung. Berikut adalah penjelasan daripada empat unsur tersebut:

1. *Attachment* (Keterikatan)

Attachment ialah keterikatan emosional individu terhadap orang-orang yang mereka sayangi dan patuhi. Menurut Hirschi (1969), keterikatan akan membentuk kedekatan emosional dengan tumbuhnya rasa peduli, ketidakinginan individu untuk mengecewakan orang-orang tersebut karena tindakannya, serta kepekaan individu terhadap opini orang-orang yang ia sayangi dan patuhi. Keterikatan emosional individu dapat dibangun melalui komunikasi, afeksi, dan pengawasan. Dalam konteks penelitian ini, proses penanggulangan fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar dapat dibantu oleh peran institusi formal dan sosial. Keterikatan individu dapat terjalin dengan keluarga, tokoh agama, dan sekolah.

Keluarga sebagai lingkungan terdekat dari individu akan membangun hubungan keterikatan yang kuat. Melalui komunikasi yang intens serta afeksi yang selalu diberikan keluarga, konsep keterikatan keluarga dan individu merupakan kontrol tidak langsung. Kedekatan emosional antara individu dengan keluarga menjadi rem secara psikologis yang ditanamkan individu dalam dirinya untuk mengontrol tindakannya. Keluarga tidak perlu mengawasi tawuran selama 24 jam penuh, namun jika ikatan batinnya kuat, anak akan terbayang-bayang keluarganya dalam pikirannya. Mereka akan lebih memikirkan dengan matang bagaimana dampak tindakan

menyimpangnya terhadap keluarganya. Begitu pula dengan rasa patuh individu terhadap sekolah serta rasa gelisah dan malu terhadap tokoh agama sebagai panutannya.

Seseorang akan merasa bersalah jika melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat oleh sekolah, ini akan memunculkan rasa takut dan ragu-ragu saat seseorang akan melakukan tindakan menyimpang. Sama halnya dengan tokoh agama panutannya, tokoh agama seringkali dianggap sebagai orang suci dan bermoral, seseorang akan lebih takut kehilangan reputasinya di depan tokoh agama dan merasa resah karena telah melanggar aturan agama. Seseorang yang memiliki keterikatan yang baik dengan orang yang disayangi dan dipatuhi cenderung masih mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari tindakannya

2. *Commitment* (Komitmen)

Commitment merupakan dimensi rasional dalam unsur ini. Hirschi menyebutkan bahwa komitmen adalah "*stake in conformity*", yaitu pertaruhan dalam kepatuhan. Situasi dimana seseorang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengejar pendidikan atau karier akan berpikir dua kali sebelum melakukan kesalahan yang akan menghancurkan rencana untuk masa depannya. Sebab konsekuensi yang harus dibayarkan akan jauh lebih banyak daripada keuntungan yang ia dapatkan. Dalam konteks penelitian ini, sekolah berperan penting dalam membentuk karakter anak, sekolah harus menumbuhkan pikiran bahwa mereka memiliki masa depan yang telalu berharga untuk disia-siakan. Jika

sekolah gagal dalam menjalankan perannya, akan berdampak buruk pada komitmen dalam diri anak. Komitmen berpengaruh besar karena dapat menciptakan rasa takut bagi anak akan kehilangan masa depan dan kerja keras yang sia-sia.

3. *Involvement* (Keterlibatan)

Involvement merujuk pada keterlibatan individu dalam aktivitas-aktivitas positif dan konvensional. Hirschi (1969) menyebutkan bahwa manusia memiliki waktu yang terbatas. Jika seseorang terlibat dalam kegiatan positif dan konvensional, seperti belajar, berolahraga, mengikuti kegiatan sekolah, mengikuti kegiatan keagamaan, organisasi bagi siswa atau kepemudaan, mengisi waktu luang dengan hobi, maka orang tersebut tidak akan memiliki waktu dan kesempatan untuk merencanakan dan mengikuti tawuran.

Dalam penelitian ini, Kelurahan Sawah Besar dan SMP Negeri 4 Semarang memiliki peran besar dalam membatasi peluang terjadinya tawuran dengan menyediakan wadah bagi remaja untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan pembentukan jadwal harian yang produktif. Semakin sering seseorang melibatkan dirinya dalam kegiatan positif, semakin kecil waktu untuk melakukan penyimpangan. Hirschi (1969) mengungkapkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas sekolah berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat kenakalan. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, tugas sekolah melibatkan komitmen siswa pada nilai sekolah sekaligus dapat menghabiskan waktu luang selama di rumah.

Institusi formal dan sosial, seperti keluarga dan sekolah bekerjasama dalam hal ini untuk mengawasi anak. Jika Kelurahan Sawah Besar dan SMP Negeri 4 Semarang sebagai institusi terdekat dalam lingkungan tidak sanggup memenuhi perannya dalam memfasilitasi kegiatan positif bagi anak, maka dapat menciptakan kekosongan ruang yang kemudian diisi oleh kegiatan negatif, termasuk tawuran. Keluarga juga harus mampu mengarahkan minat dan bakat anak untuk menyalurkannya pada hobi yang positif. Dalam hal ini, peran institusi formal dan sosial sangat krusial untuk menyediakan kegiatan positif yang mampu menyerap energi anak dan mengisi kekosongan ruang serta waktu dengan kegiatan bermanfaat.

4. *Belief* (Keyakinan)

Belief berkaitan dengan tingkat keyakinan individu terhadap nilai, norma sosial, dan aturan hukum yang berlaku. Individu menganggap bahwa aturan masyarakat yang adil harus dipatuhi. Individu yang memiliki keyakinan terhadap nilai, norma sosial, dan aturan hukum akan memandang perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang salah dan harus dihindari. Keyakinan berkaitan dengan peran institusi formal dan sosial dalam menegakkan hukum secara konsisten dan melakukan internalisasi norma.

Dalam konteks ini, jika institusi formal seperti Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari, SMP Negeri 4 Semarang, dan Kelurahan Sawah Besar dapat menunjukkan integritas dan konsistensinya dalam pembuatan serta penegakkan aturan, maka anak akan memiliki keyakinan bahwa tawuran adalah salah satu tindakan yang menyimpang aturan dan tidak seharusnya

dilakukan. Namun, apabila institusi formal tersebut tidak dapat menjalankan peran dengan semestinya, maka keyakinan individu terhadap nilai, norma sosial, dan aturan hukum yang berlaku akan melemah bahkan menghilang.

Bagi pelaku tawuran, lemahnya keyakinan dapat tercermin dari anggapan bahwa tawuran adalah hal yang wajar, lumrah, dan menjadi kewajiban bagi solidaritas kelompok agar dapat dilakukan. Seseorang yang sudah terjerumus pada aksi tawuran seringkali memiliki keyakinan yang lemah terhadap aturan atau bahkan telah sampai pada titik netralisasi, kondisi dimana seseorang menganggap aturan tidak lagi berlaku bagi mereka dalam situasi tertentu.

Keempat unsur dalam teori kontrol sosial ini saling memiliki keterikatan satu sama lain dalam membantu pengendalian perilaku. Melalui ke-empat unsur ini, seluruh institusi formal dan sosial yang terlibat, seperti Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari, SMP Negeri 4 Semarang, keluarga, dan tokoh agama berperan dalam menjaga ikatan sosial untuk berkolaborasi menanggulangi fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar. Melemahnya salah satu unsur dapat mempengaruhi kinerja unsur lainnya yang pada akhirnya berdampak pada peran institusi formal dan sosial yang tidak maksimal. Dalam penelitian ini, fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar menjadi bukti dari dampak melemahnya ikatan dan kontrol sosial antar institusi formal dan sosial.

Teori kontrol sosial menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dianggap mampu menjelaskan bahwa fenomena tawuran tidak hanya sebagai akibat dari faktor individual, tetapi sebagai akibat dari melemahnya ikatan

sosial antara pelaku tawuran dengan institusi formal dan sosial, serta melemahnya kontrol sosial institusi formal dan sosial dalam menjalankan perannya dalam menanggulangi tawuran. Dengan menggunakan teori kontrol sosial sebagai landasan teoritis, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana peran institusi formal dan sosial dijalankan, serta sejauh mana institusi formal dan sosial dalam memainkan peran kontrol sosial dalam menanggulangi tawuran. Melalui kerangka teori ini, peneliti berfokus untuk meneliti melemahnya keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan yang terjadi di Kelurahan Sawah Besar.

1.6.2 Faktor-Faktor Penyebab Tawuran

Fenomena tawuran tidak bisa jika hanya diartikan sebagai pelanggaran oleh individu-individu, tetapi sebagai gejala dari adanya disfungsi sosial dalam kontrol masyarakat serta akibat dari kurang efektifnya aturan dan norma yang berlaku, serta lemahnya kontrol sosial oleh institusi formal dan sosial. Pada penelitian ini, melalui kerangka teori kontrol sosial Hirschi (1969), faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran berkaitan dengan melemahnya ikatan sosial (*social bond*) yang terdiri dari empat unsur, yaitu *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (keyakinan). Melemahnya ikatan-ikatan tersebut dapat terjadi karena adanya kegagalan institusi formal dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Ketika fungsi kontrol sosial tidak dijalankan dengan baik oleh institusi formal dan sosial, akhirnya menciptakan celah untuk seseorang melakukan perbuatan menyimpang. Oleh karena itu, analisis faktor penyebab tawuran dalam penelitian ini akan difokuskan pada tiga faktor, yaitu faktor

disfungsi dalam keluarga, faktor disfungsi dalam lingkungan sosial, dan faktor disfungsi dalam institusi pendidikan.

Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang menjadi tempat bagi seorang anak untuk membentuk karakter, pola pikir, dan kebiasaan. Keluarga terutama orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh hak bagi anak dalam proses pertumbuhannya, jika hal ini dapat berjalan dengan baik maka anak akan tumbuh dengan watak yang baik pula. Sebagai tempat belajar pertama bagi anak di lingkungan terdekatnya, orang tua wajib bertanggung jawab menjadi tempat belajar tentang nilai-nilai penting, interaksi, percakapan, pengamatan, prinsip, etika, aturan, dan norma sosial dalam kehidupan (Saputra, et al., 2024). Orang tua juga harus menciptakan suasana rumah yang kondusif, harmonis, suportif, menjamin kesehatan mental anak dengan tidak melakukan KDRT.

Dengan terpenuhinya kondisi-kondisi tersebut di lingkungan rumah selama masa pertumbuhan anak, maka anak akan selalu merasa cukup dan disayangi. Kebiasaan mengobrol dan berkomunikasi secara terbuka dua arah juga dapat membantu terjalinnya keterikatan hubungan antara orang tua dengan anak, nantinya anak akan selalu merasa didengar, tidak haus validasi dari luar, dan selalu merasa percaya diri. Selain itu, yang terpenting adalah orang tua harus menjamin pemenuhan finansial dan kebutuhan ekonomi yang stabil untuk anak sehingga segala fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh anak dapat terpenuhi tanpa ada beban.

Namun, disfungsi sosial masih kerap terjadi ketika keluarga menjalankan perannya, seperti tekanan akibat ekonomi yang masih dialami oleh beberapa keluarga apalagi bagi keluarga yang tinggal di perkotaan dengan tingkat tekanan

beban kerja yang lebih tinggi. Orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini harus pandai menerapkan manajemen waktu dan emosional kepada anak. Kebanyakan orang tua yang sibuk bekerja sudah pasti waktu dan tenaganya akan habis tersita oleh pekerjaan, orang tua akan menerapkan pola asuh yang tidak teratur, dan minim melakukan pengawasan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terciptanya jarak emosional (*emotional gap*) dan keterikatan batin yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi atau hanya terjadi komunikasi satu arah dan tidak terbuka yang akhirnya menimbulkan perasaan-perasaan yang hanya dapat dipendam dan konflik internal yang berkepanjangan.

Beberapa temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa pelaku tawuran adalah anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi yang tidak stabil. Anak yang tumbuh dengan baik dan terpenuhi segala urusan batin dan kebutuhannya adalah anak dari keluarga yang mampu memberikan segala perhatian dengan ekonomi yang baik. Maka dengan ini, anak yang terlibat dalam tawuran adalah bentuk dari konsekuensi lemahnya fungsi kontrol sosial keluarga, tidak semata-mata karena anak yang membangkang (Resti, et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya disfungsi sosial karena ketidak mampuan keluarga untuk memberikan keterikatan yang stabil dan kegagalan dalam menumbuhkan komitmen untuk masa depan.

Selain keluarga, lingkungan sosial yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga menjadi tempat berinteraksi dan beraktifitas sehari-hari, pembentukan norma sosial, dan tempat pengimplementasian aturan serta pengawasan sosial juga menjadi hal signifikan terjadinya tawuran. Lingkungan sosial yang memiliki iklim minimnya interaksi, rendahnya kepedulian warga, hingga minimnya peran tokoh

masyarakat yang menjadi institusi formal dan sosial nantinya akan menciptakan celah tumbuhnya perilaku menyimpang dalam masyarakat (Nasution, et al., 2024). Lingkungan sosial mulai dari tetangga terdekat, teman terdekat, karang taruna, pemerintahan lokal terdekat mulai dari tingkat RT hingga kelurahan bertanggungjawab menyediakan kondisi lingkungan yang positif. Sebaliknya, jika lingkungan gagal menyediakan lingkungan yang positif, maka disfungsi sosial pada lingkungan akan terjadi.

Lingkungan yang tidak menyediakan aktivitas sosial terutama aktivitas kepemudaan mengingat mayoritas pelaku tawuran berusia remaja, merupakan kondisi dimana lingkungan tersebut tidak menjalankan fungsi kontrol sosial dengan baik, karena akan tumbuh kebiasaan lemahnya keterlibatan remaja dalam agenda lingkungan sosial. Tokoh masyarakat juga berkewajiban untuk menciptakan dan memberikan ruang publik yang aman guna masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Akibat dari minimnya kegiatan organisasi kepemudaan, kegiatan olahraga, interaksi antar warga, dan kurangnya inisiatif lingkungan untuk manajemen waktu luang remaja adalah berdampak pada energi dan waktu remaja yang bisa saja tersalurkan kepada hal-hal negatif yang mengarah ke tawuran. Dengan demikian, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tidak mampunya lingkungan sosial menyediakan keterlibatan (*involvement*) dalam aktivitas positif dan ruang aman bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dan berkegiatan ialah salah satu bentuk disfungsi peran institusi formal dan sosial dalam menjaga kontrol sosial. Kondisi ini dapat berakhir pada lemahnya keterikatan, keterlibatan, dan keyakinan remaja pada norma sosial.

Pendidikan, khususnya sekolah sebagai institusi formal, memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap remaja. Sekolah tidak hanya berkewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi siswa, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membentuk karakter, menanamkan pemahaman tentang nilai dan norma sosial, serta menginternalisasi norma sosial yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, sekolah harusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk mengembangkan dirinya, mencari potensi terpendam, menumbuhkan minat dan bakat yang nantinya akan membantu menciptakan keterikatan sosial dan berkomitmen dengan masa depannya yang sudah terorganisir. Namun, jika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan sesuai yang seharusnya, institusi pendidikan juga dapat dicap mengalami disfungsi kontrol sosial.

Permasalahan yang kerap muncul di lingkungan sekolah bagi siswa adalah, siswa menganggap bahwa hubungan guru dan siswa sifatnya kaku dan otoriter, sekolah juga dianggap sebagai pihak yang akan memberinya hukuman dan sanksi saja tanpa ada pendekatan lain jika siswa melakukan hal menyimpang. Dalam kondisi ini, ikatan emosional antar siswa dan sekolah tidak akan tumbuh dengan baik, mereka hanya akan mematuhi aturan dan norma sekolah karena rasa takut dan cemas, bukan karena kesadaran diri. Disfungsi sekolah dalam menjalankan perannya sebagai *social bond builder* mendorong remaja untuk memusatkan keterikatannya kepada kelompok yang menyimpang.

1.7 Definisi Konsep

1.7.1 Tawuran sebagai Masalah Sosial

Tawuran dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari penyimpangan sosial yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik hingga penggunaan senjata tajam yang disebabkan oleh sebuah konflik yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Tawuran biasanya melibatkan antara dua kelompok remaja antar sekolah, kelompok wilayah, dan kelompok *gangster*. Konflik pemicu aksi tawuran kerap kali lebih dari sekadar persoalan antarindividu yang melibatkan kelompok, konflik biasanya dipicu karena adanya ambisi sekelompok remaja yang berlomba-lomba menunjukkan dominasi dan mempertahankan solidaritas atas kehormatan kelompoknya, balas dendam, hingga permusuhan antar kelompok turun temurun. Tawuran kerap kali terjadi di ruang publik yang akhirnya menimbulkan kekacauan lingkungan akibat adanya bentrokan, diantaranya adanya kerusakan fasilitas umum, korban fisik maupun mental, serta keamanan masyarakat yang terganggu.

1.7.2 Kontrol Sosial

Dalam penelitian ini, kontrol sosial memiliki arti sebagai mekanisme yang digunakan oleh pihak berwenang untuk mengatur, mengarahkan, dan membatasi perilaku dan tindakan masyarakat atau pihak yang terlibat agar bertindak sesuai dengan nilai, norma sosial, dan hukum yang disepakati dan berlaku untuk khalayak umum. Tujuan dari adanya kontrol sosial dalam bermasyarakat adalah guna mencegah, mengurangi, dan menanggulangi adanya penyimpangan sosial yang dilakukan masyarakat, sehingga tercipta keteraturan di lingkungan. Kontrol sosial tidak hanya dijalankan secara formal oleh institusi-institusi seperti pemerintah dan

kepolisian, tetapi juga dijalankan melalui pendekatan sosial oleh keluarga, lingkungan pertemanan, dan ajaran agama.

1.7.3 Institusi Formal

Institusi formal dapat digambarkan melalui lembaga atau organisasi yang terbentuk secara resmi oleh negara dan bertugas untuk membentuk dan menjalankan aturan dan struktur organisasi yang jelas dan paten. Institusi formal memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas keteraturan masyarakat melalui penegakan hukum, institusi pendidikan, pelayanan publik, dan birokrasi pemerintahan.

1.7.4 Institusi Sosial

Institusi sosial ialah keterikatan hubungan antara seseorang dengan nilai, norma sosial, dan peran yang terbentuk melalui ikatan keluarga, tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan. Institusi sosial bertujuan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui lingkungan terdekatnya. Melalui institusi sosial, seseorang akan mulai belajar tentang nilai, peran, norma sosial, dan tradisi. Institusi sosial dapat digambarkan melalui keluarga, pertemanan, ajaran agama, hingga tradisi dan budaya.

1.8 Operasionalisasi Konsep/Kerangka Berpikir

1.8.1 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini disusun untuk menjabarkan konsep-konsep abstrak yang digunakan ke dalam dimensi dan aspek yang dapat digali secara empiris di lapangan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, operasionalisasi konsep tidak dimaksudkan untuk mengukur

variabel secara kuantitatif, melainkan sebagai pedoman analitis dalam memahami peran institusi formal dan sosial serta mekanisme kontrol sosial dalam mencegah fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang. Penyusunan operasionalisasi konsep ini mengacu pada teori kontrol sosial Travis Hirschi (1969), khususnya unsur *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana peran institusi formal dan sosial berfungsi dalam memperkuat atau melemahkan kontrol sosial terhadap remaja.

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi Konsep	Definisi Konseptual	Aspek yang Digali
Kontrol Sosial (Hirschi, 1969)	<i>Attachment</i> (Keterikatan)	Kedekatan emosional dan sensitivitas pelaku tawuran terhadap ekspektasi orang yang mereka sayangi dan patuhi.	Rasa hormat, patuh, dan peduli untuk keluarga dan guru, intensitas komunikasi dengan keluarga, dan tingkat spiritual
	<i>Commitment</i> (Komitmen)	Pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk pendidikan dan karier masa depan.	Keinginan berpendidikan dan meraih cita-cita, ketakutan penurunan nilai dan value, serta kepatuhan pada aturan.
	<i>Involvement</i> (Keterlibatan)	Pemanfaatan waktu luang untuk aktivitas positif.	Menghabiskan waktu untuk belajar dan mengikuti kegiatan sekolah, serta terlibat pada kegiatan positif di lingkungan sekitar.
	<i>Belief</i> (Keyakinan)	Integritas individu terhadap nilai,	Keyakinan bahwa aturan dibuat

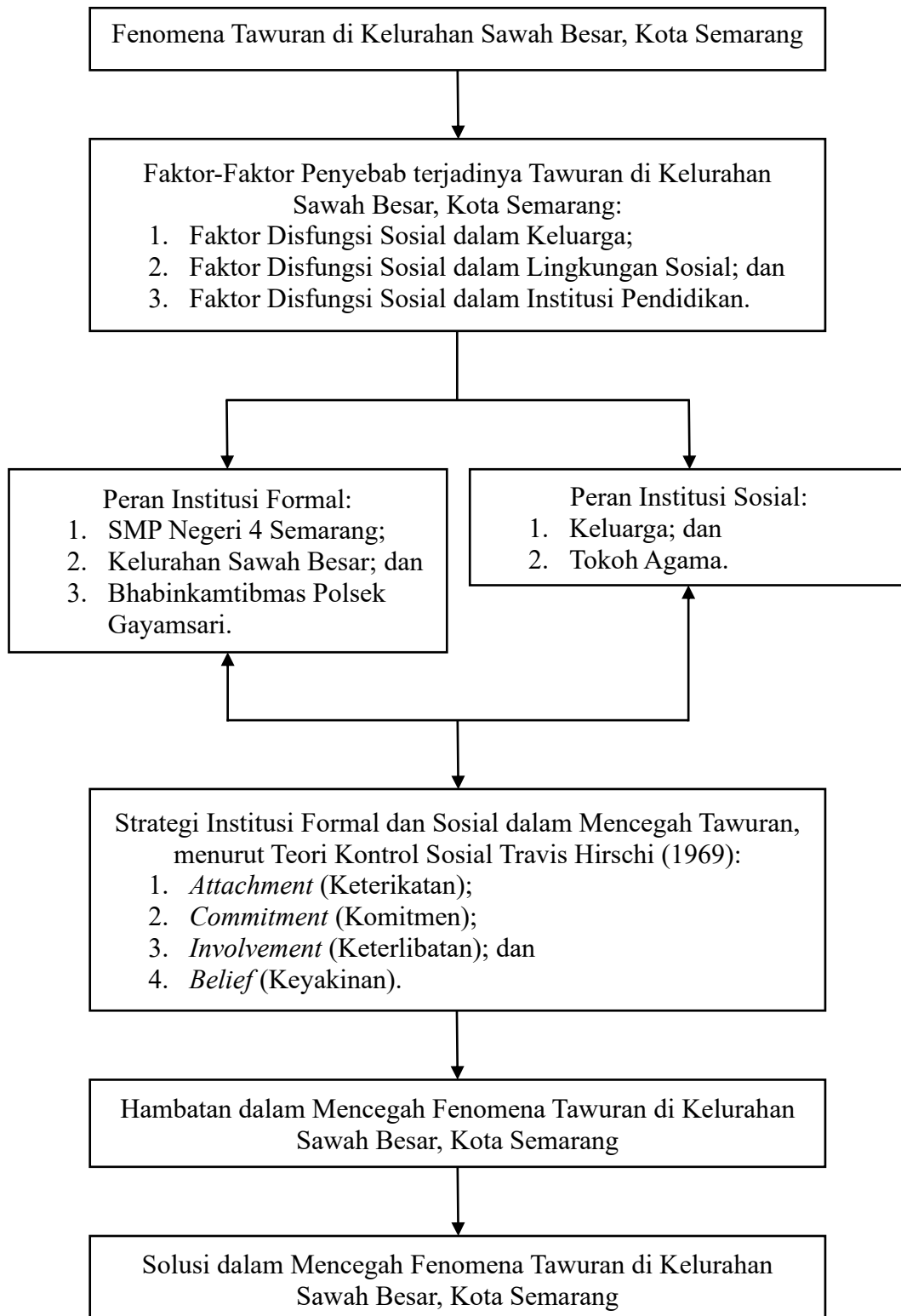
		norma sosial, dan hukum.	untuk kebaikan bersama, integritas dan horma terhadap pihak pembuat aturan.
Institusi Formal	SMP Negeri 4 Semarang	Institusi pendidikan.	Pengawasan dan penanganan konflik siswa, serta pembentukan pendidikan karakter.
	Kelurahan Sawah Besar	Instansi pemerintahan tingkat lokal.	Koordinasi antar institusi, fasilitasi sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan, dan menjaga ketertiban lingkungan.
	Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari	Aparat penegak hukum.	Upaya preventif dan represif, serta penindakan dan penegakan hukum.
Institusi Sosial	Keluarga	Lingkungan pertama bagi tumbuh kembang anak.	Pola asuh dan komunikasi, pengawasan anak, dukungan emosional dan pembentukan nilai.
	Tokoh Agama	Tokoh spiritual yang membantu mengarahkan ajaran agama.	Arahan pentingnya taat agama, hubungan spiritual, dan ajakan meninggalkan penyimpangan sosial.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

1.8.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau bisa juga disebut sebagai kerangka konseptual adalah kerangka yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam memecahkan

masalah yang telah diidentifikasi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran institusi formal dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang, serta merumuskan faktor. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan fenomena sosial tertentu. Menurut Erickson (dalam Anggito dan Setiawan, 2018) penelitian kualitatif adalah metode yang mendeskripsikan dan menggambarkan aktivitas yang dianggap sebagai fenomena serta menjelaskan bagaimana dampak dari fenomena tersebut terhadap kehidupan secara naratif. Metode ini tidak memerlukan statistik, namun mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan ditafsirkan. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti tidak memanipulasi *variable* yang diteliti, kejadian, kegiatan, dan keadaan. Pada penelitian ini, metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menganalisis peran institusi formal dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah tawuran di Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti. Pada penelitian ini, situs penelitiannya adalah Kelurahan Sawah Besar, SMP Negeri 4 Semarang, dan Polsek Gayamsari.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, kelompok, ataupun lembaga yang diteliti (Dartiningsih, 2016). Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan, yaitu orang yang menyampaikan informasi berupa data yang berkaitan dengan penelitian serta dibutuhkan peneliti. Pada penelitian ini, subjek

dipilih melalui metode *purposive sampling*. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dalam menentukan subjek, peneliti harus memiliki kriteria khusus yang cocok dan akan menjadi instrumen kunci pada fenomena yang sedang diteliti. Adapun subjek-subjek penelitian dalam penelitian ini diantaranya, satu Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 4 Semarang, satu personel Unit Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari, satu staff penelaah Kelurahan Sawah Besar, satu ustadz sebagai tokoh agama, dua orang tua dari keluarga pelaku tawuran, dan tiga pelaku tawuran.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai dua sumber data tersebut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diungkapkan atau diberikan oleh narasumber dengan cara melakukan wawancara (Arikunto dan Suharsimi, 2016). Dalam konteks penelitian ini, data primer berasal dari informasi dalam wawancara yang diberikan oleh narasumber dari institusi formal dan sosial yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang. Adapun narasumber dari institusi formal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, ialah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Semarang, Lurah Kelurahan Sawah Besar, dan Bhabinkamtibmas wilayah Kelurahan Sawah Besar. Sedangkan narasumber

dari institusi sosial meliputi keluarga dari pelaku tawuran dan ustadz atau imam besar Kelurahan Sawah Besar selaku tokoh agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk menggambarkan data primer. Menurut Hikmawati (2020), data sekunder adalah data yang sudah diolah, dipublikasikan, dan sudah menjadi arsip berkas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang berasal dari jurnal, artikel, berita, dokumen, serta peran kebijakan yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Selain itu, terdapat pula berkas-berkas atau catatan pendukung, dan foto-foto yang didapat dari narasumber.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi dan fakta lapangan mengenai topik yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Berikut penjelasan kedua teknik tersebut:

1. Wawancara

Menurut Denzin (dalam Black Dan Champion dalam Fadhallah, 2021) wawancara merupakan percakapan tatap muka dimana salah satu pihak akan menggali informasi dari lawan bicaranya. Penggalan informasi tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan relevan yang ingin diketahui oleh peneliti mengenai topik penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang sudah disiapkan pertanyaannya. Namun, urutan

dalam pengajuan pertanyaan bersifat fleksibel, menyesuaikan narasumber. Media yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menyimpan hasil wawancara adalah *voice recorder*. Dalam konteks penelitian ini, pihak yang akan menjadi instrumen utama dalam wawancara adalah pihak-pihak institusi formal dan sosial yang berperan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah langkah awal dalam proses penyusunan penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, data, atau dokumen arsip yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan studi pustaka, peneliti akan melakukan *brainstorming* sehingga dapat memahami secara mendalam tentang topik penelitian dari berbagai perspektif serta membantu peneliti untuk menentukan teori dan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya. Tujuan lain dari studi pustaka adalah mengungkapkan adanya kesenjangan yang masih perlu ditambahkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan dalam pengambilan studi pustaka adalah berbagai literatur, buku, jurnal, artikel, atau berita yang sebelumnya sudah diteliti, dianalisis, serta dipublikasi dan relevan dengan topik penelitian.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah upaya untuk mencari data lalu menyusunnya secara sistematis melalui hasil dari wawancara, dokumentasi, observasi, dan lain-lain,

guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang topik yang diteliti dengan berupaya mencari makna, kemudian menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, 1998). Menurut Milles dan Huberman (dalam Sudrajat, 2014) dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan, antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga alur tersebut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan upaya dalam menyimpulkan data yang telah diteliti yang setelah itu dipilah-pilah dan dikelompokkan dalam satu kategori, konsep, atau tema tertentu (Rijali, 2018). Reduksi data dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Melalui data yang telah direduksi, peneliti akan semakin mudah dalam mengumpulkan dan mengkaji data-data selanjutnya. Tahapan pertama yang dilakukan dalam mereduksi data adalah dengan mentranskrip data hasil wawancara yang telah didokumentasikan menggunakan *voice recorder*. Dalam proses mentranskrip data hasil wawancara diperlukan pemeriksaan ulang untuk mencocokkan apakah data yang telah ditranskrip sudah akurat. Data yang telah ditranskrip dan diringkas, kemudian disaring dan dipilah menyesuaikan keterbutuhan data pada penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun, mengorganisasi, dan menyajikan data yang telah direduksi secara terstruktur oleh peneliti. Tujuan dilakukannya penyajian data adalah untuk mempermudah peneliti dalam

menganalisis data yang akhirnya menghasilkan pemahaman lebih mendalam tentang data yang sedang dikaji, juga agar memudahkan peneliti untuk menyusun dan menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk narasi, gambar, diagram, atau matriks. Menurut Milles dan Huberman, penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

3. Verifikasi

Verifikasi dalam penelitian kualitatif artinya memastikan legalitas, keabsahan, dan kredibilitas, serta mencegah terjadinya bias pada data dan temuan dalam penelitian. Data yang telah diverifikasi akan menjadi data yang lebih kuat dan kredibel jika sudah melewati proses verifikasi. Verifikasi secara holistik adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan menjawab rumusan masalah pada suatu penelitian.

1.9.7 Kualitas Data

Uji keabsahan dan kualitas data dalam penelitian ini akan dilakukan untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan empiris. Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan dan kualitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi data. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi data merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, dan waktu pengambilan data. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu dari pihak institusi pendidikan yang diwakili oleh SMP Negeri 4 Semarang, Kelurahan Sawah Besar, Bhabinkamtibmas

Polsek Gayamsari, keluarga pelaku tawuran, ustadz sebagai tokoh agama, dan pelaku tawuran. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan seluruh informan, observasi lapangan, dan hasil dokumentasi guna memperoleh data yang konsisten dan kuat.

Melalui proses triangulasi data dan triangulasi teknik, dapat dipastikan bahwa informasi mengenai peran institusi formal dan sosial dalam mencegah fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar dapat diverifikasi sehingga data yang diperoleh dapat dianggap berkredibilitas. Tujuan dilakukannya proses triangulasi data adalah agar mengurangi subjektivitas peneliti maupun informan, serta memberikan gambaran yang komprehensif atas seluruh data yang telah dikumpulkan.